


I.1 LATAR BELAKANG

 etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bagian Keuangan – Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Bagian Keuangan – Biro PKT memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bagian Keuangan merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha) tahun 2018.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian Keuangan – Biro PKT adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan

program/ kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bagian Keuangan – Biro PKT adalah melaksanakan urusan administrasi keuangan dan administrasi pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Bagian Keuangan – Biro PKT menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan.
2. pelaksanaan urusan tata usaha pendapatan negara
3. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan

Struktur Bagian Keuangan dapat dilihat pada gambar berikut.

Bagan Struktur Organisasi



Gambar I.1
Struktur Organisasi Bagian Keuangan – Biro PKT

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bagian Keuangan – Biro PKT mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan, dengan tugas melakukan urusan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan
2. Sub Bagian Administrasi Pendapatan, dengan tugas melakukan perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran pendapatan serta penyusunan laporan pendapatan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku

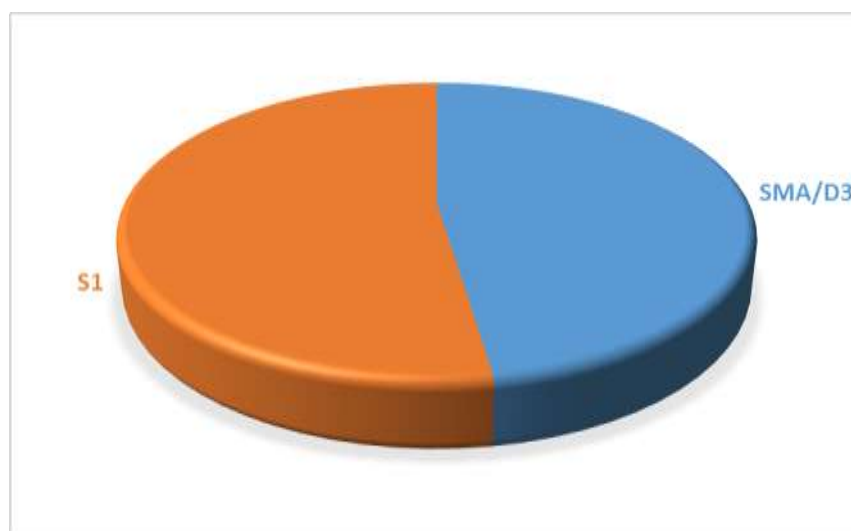
I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2018 Bagian Keuangan – Biro PKT memiliki personel berstatus

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 18 (delapan belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Bagian Keuangan – Biro PKT

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	
1.	Bagian Keuangan		1	-	1
2.	Sub Bagian Tata Usaha Keuangan	7	6	-	13
3.	Sub Bagian Administrasi Pendapatan	2	2		4
	Jumlah	9	11	-	18



Gambar I.2
Diagram Pie Komposisi Pendidikan Personel ASN Bagian Keuangan

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bagian Keuangan – Biro PKT mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu menjalankan peran pengelolaan keuangan. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bagian Keuangan – Biro PKT telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Bagian Keuangan – Biro PKT

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan keuangan tersentralisasi di Bagian Keuangan dengan sistem pengelolaan yang sesuai peraturan perundangan dan BSN hanya memiliki 1 (satu) satuan Kerja 2. Terdapat beberapa aplikasi keuangan yang mempermudah pengelolaan keuangan, termasuk Sistem Informasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (SIPAKAR) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua pejabat struktural yang memahami proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga pengawasan dan pengendalian masih kurang efektif 2. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan, khususnya di unit kerja teknis 3. Belum terintegrasinya aplikasi keuangan yang ada, sehingga belum optimal pemanfaatannya 4. Adanya beberapa staf yang pensiun dan mutasi ke unit lain tanpa adanya staf pengganti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya peningkatan pemahaman pejabat struktural melalui sosialisasi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan secara periodik 2. Melakukan pelatihan/bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan kepada para pegawai yang ditugaskan dari unit kerja teknis, khususnya yang ditugaskan dalam pengelolaan keuangan 3. Melakukan integrasi aplikasi keuangan yang ada dengan bantuan pengembang aplikasi yang kompeten 4. Memberikan rangkap pekerjaan kepada beberapa staf bagian keuangan untuk mengatasi keterbatasan personil.

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Bagian Keuangan sesuai Renstra Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

“Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha yang profesional, transparan dan akuntabel”

MISI

1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, dan tata usaha untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.
2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha adalah sebagai berikut:

TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah tangga;
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN.

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2018, sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah tangga
2. Terlaksananya pengelolaan anggaran yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT
4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel
5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN
6. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola dan organisasi yang profesional;
2. Meningkatnya pelayanan publik dan layanan prima di lingkungan BSN;
3. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja;
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran;
5. Meningkatkan kualitas penerapan e-govt;
6. Meningkatkan perencanaan dan monitoring evaluasi anggaran;
7. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang akurat dan akuntabel;
8. Meningkatkan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga;
9. Meningkatkan pengelolaan uang persediaan dan penerimaan negara;
10. Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di Biro PKT;
11. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Biro PKT;
12. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Biro PKT;
13. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Biro PKT.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha
Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
Stakeholder Perspectives		
1. Meningkatnya tata kelola dan organisasi yang profesional	1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai LKE AKIP BSN)	70 (BB) nilai
2. Meningkatnya pelayanan publik dan layanan prima di lingkungan BSN	2. Indeks kepuasan layanan internal	3.4 nilai
3. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja	3. % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	100%
	4. % Pemanfaatan BMN	100%
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran	5. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP opini
	6. % Realisasi Anggaran	≥ 95 %
	7. % Peningkatan PNBP	10%
Internal Process Perspectives		
5. Meningkatkan kualitas penerapan e-govt	8. Indeks kepuasan penerapan e-govt	3 skor
6. Meningkatkan perencanaan dan monitoring evaluasi anggaran	9. % Pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu	100 %
	10. % Unit kerja yang menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu	60 %
7. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang akurat dan akuntabel	11. % pengajuan anggaran baseline BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif	90 %
	12. % pemenuhan kriteria pengawasan keuangan negara	100 %
8. Meningkatkan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga	13. % Barang Milik Negara yang terinventarisir (perencanaan s.d pemanfaatan)	100 %
	14. % penyelesaian lelang paket pekerjaan	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
9. Meningkatkan pengelolaan uang persediaan dan penerimaan negara	15. Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun	150 kali
	16. % Realisasi target penerimaan PNB	100 %
Learning and Growth Perspectives		
10. Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di Biro PKT	17. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)	83 nilai
	18. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	70 (BB) nilai
11. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Biro PKT	19. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100 %
	20. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	1 orang
12. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Biro PKT	21. % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	100 %
	22. % Pemanfaatan BMN	100%
13. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Biro PKT	23. % Realisasi Anggaran	≥ 95 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 13 (tiga belas) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Bagian Keuangan – Biro PKT Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
1.	Meningkatnya pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel	1. Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan	4 laporan
		2. Jumlah draft laporan keuangan BSN (bulanan, triwulan, semester, unaudited dan audited)	19 laporan
		3. Jumlah draft dokumen review peraturan/pedoman	1 Dokumen
		4. Jumlah sosialisasi untuk pengelolaan keuangan	5 kali
		5. Jumlah draft laporan koordinasi supervisi pelaksanaan keuangan	5 laporan
		6. Jumlah perputaran uang persediaan dalam setahun	150 kali
2	Meningkatnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7. Jumlah draft dokumen target penerimaan PNBP TA.2019	1 Dokumen
		8. Jumlah draft Perka BSN terkait Revisi PP PNBP	4 Dokumen
		9. Jumlah pelaksanaan sosialisasi revisi PP PNBP BSN	1 Laporan

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas melalui Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha yang menghasilkan output Layanan Manajemen Keuangan yang terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:

1. Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan
3. Melaksanakan Tata Laksana Keuangan
4. Melaksanakan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Kepala Bagian Keuangan berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Kepala Bagian Keuangan telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Kepala Bagian Keuangan Tahun 2018.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait dengan Bagian Keuangan yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Kepala Bagian Keuangan Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
1. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel	1. Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan	4 laporan	4 laporan	100%
	2. Jumlah draft laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, unaudited dan audited	19 laporan	19 laporan	100%
	3. Jumlah draft dokumen review peraturan/pedoman	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	4. Jumlah sosialisasi untuk pengelolaan keuangan	5 kali	5 kali	100%
	5. Jumlah draft laporan koordinasi supervisi pelaksanaan keuangan	5 laporan	5 laporan	100%
	6. Jumlah perputaran uang persediaan dalam setahun	150 kali	140 kali	93%
2. Meningkatkan pengelolaan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7. Jumlah draft target penerimaan PNBP BSN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	8. Jumlah draft Perka BSN terkait Revisi PP PNBP	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	9. Jumlah pelaksanaan sosialisasi revisi PP PNBP BSN	1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja **Kepala Bagian Keuangan** untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**SASARAN
1****Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel****Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan	4 laporan	4 laporan	100%	10 laporan	-60%
2. Jumlah draft laporan keuangan BSN (bulanan, triwulan, semester, unaudited dan audited)	19 laporan	19 laporan	100%	19 laporan	-
3. Jumlah draft dokumen review peraturan/pedoman	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 dokumen	-80%
4. Jumlah sosialisasi untuk pengelolaan keuangan	5 kali	5 kali	100%	1 kali	500%
5. Jumlah draft laporan koordinasi supervisi pelaksanaan keuangan	5 laporan	5 laporan	100%	13 laporan	-61%
6. Jumlah perputaran uang persediaan dalam setahun	150 kali	140 kali	93%	Tidak ada	-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja yaitu (1) Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan; (2) Jumlah draft laporan keuangan BSN (bulanan, triwulan, semester, unaudited dan audited); (3) Jumlah draft dokumen review peraturan/pedoman; (4) Jumlah sosialisasi untuk pengelolaan keuangan; (5) Jumlah draft laporan koordinasi supervisi pelaksanaan keuangan; (6) Jumlah perputaran uang persediaan dalam setahun. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 98,83%. Selain indikator Jumlah perputaran uang persediaan dalam setahun yang mencapai 93%,

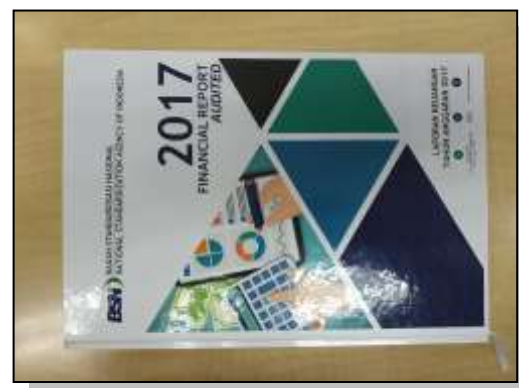
indikator lainnya berhasil mencapai target 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Indikator Kinerja : Jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan

Indikator Kinerja ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keteraturan dan kesesuaian pertanggungjawaban dengan peraturan keuangan yang berlaku. Pada tahun 2018 Bagian Keuangan menargetkan untuk menghasilkan 4 (empat) buah laporan. Sampai dengan akhir tahun 2018 Bagian Keuangan menghasilkan 4 (empat) buah laporan, yang menjadikan presentase realisasi indikator kinerja ini mencapai 100%.

2. Indikator Kinerja : Jumlah draft laporan keuangan BSN (bulanan, triwulan, semester, unaudited dan audited)

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya draft laporan keuangan BSN (bulanan, triwulan, semester, unaudited, dan audited) adalah jumlah laporan yang dihasilkan. Selama tahun 2018, Bagian Keuangan telah membuat sebanyak 19 laporan untuk laporan yang terkait. Laporan tersebut disusun setelah Bagian Keuangan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV untuk merekonsiliasi Pagu Belanja, Belanja, Pengembalian Belanja, Estimasi PNBPN, jumlah PNBPN, serta pengembalian PNBPN dalam setiap periode yang berkaitan. Sehingga angka yang tersaji dalam setiap laporan yang dihasilkan dapat diyakini kebenarannya. Keberhasilan dalam mewujudkan draft laporan yang sesuai dengan target dapat dilihat dari tidak adanya sanksi penundaan pencairan UP atau LS yang dikenakan oleh KPPN. Dimana Bagian Keuangan selalu tepat waktu dalam rekonsiliasi serta menyampaikan Draft Laporan yang dimaksud.



3. Indikator Kinerja : Jumlah draft dokumen review peraturan/pedoman

Selama tahun anggaran 2018 Bagian Keuangan bersama Bagian Hukum dan Inspektorat BSN telah melakukan review atas pedoman pelaksanaan anggaran, dari hasil review tersebut menghasilkan perubahan istilah dalam pengelolaan anggaran dan alur proses pelaksanaan anggaran, draft perubahan pedoman tersebut saat ini sedang dalam proses koreksi oleh Bagian Hukum, sebelum ditetapkan oleh Kepala BSN. Pada tahun 2018 sudah sudah tercapai 1 dokumen draft dokumen review peraturan/pedoman sehingga dapat terealisasi 100%.

4. Indikator Kinerja : Jumlah sosialisasi untuk pengelolaan keuangan

Pada tahun 2018 sudah dilakukan sosialisasi peraturan terkait pelaksanaan anggaran, perpajakan, perjalanan dinas, Standar Biaya Masukan serta sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan No 17 Tahun 2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan Bagian keuangan telah melaksanakan 5 kali sosialisasi seperti uraian di atas sehingga dapat terealisasi 100%.



5. Indikator Kinerja : Jumlah draft laporan koordinasi supervisi pelaksanaan keuangan

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya jumlah draft laporan koordinasi supervisi pelaksanaan keuangan adalah tercapainya jumlah laporan yang terkait dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 5 laporan.

Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk persamaan persepsi terkait dengan kegiatan pelaksanaan anggaran yang akan dilakukan tiap Biro/Pusat di 5 kota selama tahun 2018. Adapun kota yang dimaksud adalah Surabaya, Bali, Yogyakarta, Palembang, dan Makassar. Kegiatan yang dilakukan meliputi Monitoring dan Supervisi Bulan Mutu Nasional, Pertemuan Teknis Asesor, *Stakeholder Engagement in ISO*, Pemecahan Rekor Muri Pempeklakan ber-SNI, dan Survey Persepsi Masyarakat. Dan juga dalam kegiatan ini, Bagian Keuangan membantu tiap Biro/Pusat untuk mengetahui capaian realisasi anggaran yang telah berjalan serta memonitor apakah perencanaan yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik dan terarah.

6. Indikator Kinerja : Jumlah perputaran uang persediaan dalam setahun

Pada tahun 2018 total perputaran uang persediaan mencapai 140 kali dari target 150 kali atau sebesar 93%. Hal ini disebabkan adanya jumlah pagu anggaran BSN dialokasikan pada SBSN untuk pembangunan gedung laboratorium SNSU sebesar Rp 50 miliar. Sehingga frekuensi penggunaan uang persediaan berkurang. Hal ini mengakibatkan pencapaian jumlah perputaran uang persediaan dalam setahun di bawah target yang telah ditetapkan.

**SASARAN
2****Meningkatnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)****Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
7. Jumlah draft target penerimaan PNBP BSN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-
8. Jumlah draft Perka BSN terkait Revisi PP PNBP	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	-
9. Jumlah pelaksanaan sosialisasi revisi PP PNBP BSN	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Jumlah draft target penerimaan PNBP BSN; (2) Jumlah draft Perka BSN terkait Revisi PP PNBP; (3) Jumlah pelaksanaan sosialisasi revisi PP PNBP BSN. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut seluruhnya mencapai 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

7. Indikator Kinerja : Jumlah draft target penerimaan PNBP BSN

Setiap tahun Bagian Keuangan menyusun target Penerimaan PNBP. Adapun target penerimaan PNBP untuk tahun 2019

NO	URAIAN	TA. 2018	
		TARGET	PAGU
1	Jasa Akreditasi	17.216.000.000	15.232.716.800
2	Jasa Diklat Standardisasi	1.285.000.000	1.136.968.000
3	Jasa Informasi Standardisasi	1,499,994,000	1,327,194,691
4	Jasa Penerbitan Nomor Identifikasi (IIN)	54,750,000	48,442,800
	JUMLAH	18,008,244,000	15,933,694,291

Sedangkan Target penerimaan PNBP pada tahun 2018 sebesar 18.008.244.400 dan tercapai realisasi sebesar 22.091.725.417 atau sebesar 122,68%.

8. Indikator Kinerja : Jumlah draft Perka BSN terkait Revisi PP PNBP

Pada tahun 2018 sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional. Draft Perka BSN terkait PP No. 40 Tahun 2018 sampai dengan saat ini masih dalam proses penyusunan.



9. Indikator Kinerja : Jumlah pelaksanaan sosialisasi revisi PP PNBP BSN

Sosialisasi Revisi PP PNBP BSN sudah dilaksanakan pada Bulan Oktober di kota Surabaya dengan mengundang Laboratorium, Lembaga Sertifikasi, dan Bank. Sosialisasi pada tahun ini hanya dilaksanakan satu kali yang seharusnya 2 (dua) kali adapun alasan tahun 2018 hanya bisa diselenggarakan satu kali karena adanya pemotongan anggaran. Pada sosialisasi tersebut disampaikan mengenai perubahan PP tarif yang baru di BSN.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal **7 Desember 2017**, pagu anggaran Bagian Keuangan adalah sebesar Rp 2.319.390.000,- dengan pemotongan menjadi Rp 2.054.390.000,- dan realisasi anggaran Bagian Keuangan TA 2018 adalah sebesar Rp 2.047.699.543,- sebesar 99,67%.

Pagu dan realisasi anggaran Bagian Keuangan TA 2018 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.xx
Pagu dan Realisasi Anggaran
Bagian Keuangan TA 2018

Dalam rupiah

Kode	Output/Komponen	2018		%
		Pagu	Realisasi	
051	Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan	329.945.000	326.637.995	99,00%
052	Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan	1.193.527.000	1.192.008.054	99,87%
053	Melaksanakan Tata Laksana Keuangan	244.550.000	244.017.919	99,78%
054	Melaksanakan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	286.368.000	285.035.575	99,53%
	Jumlah	2.054.390.000	2.047.699.543	99,67%

Laporan Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2018 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bagian Keuangan Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Kepala Bagian Keuangan Tahun 2018, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Kepala Bagian Keuangan
Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha



BADAN STANDARDISASI NASIONAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BAGIAN KEUANGAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel	1 Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan	4 Laporan
	2 Jumlah draft Laporan Keuangan BSN (bulanan, triwulan, semester, unaudited dan audited)	19 Laporan
	3 Jumlah draft dokumen review peraturan/ pedoman	1 Dokumen
	4 Jumlah sosialisasi untuk pengelolaan keuangan	5 Kali
	5 Jumlah draft laporan koordinasi supervisi pelaksanaan keuangan	5 Laporan
	6 Jumlah perputaran uang persediaan dalam setahun	150 kali
2 Meningkatkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7 Jumlah draft target penerimaan PNBP BSN	1 Dokumen
	8 Jumlah draft Perka BSN terkait revisi PP PNBP BSN	4 Dokumen
	9 Jumlah pelaksanaan sosialisasi revisi PP PNBP BSN	1 Kali

Output

1 Layanan Manajemen Keuangan

Anggaran (Rp.)

2,319,390,000

Pihak Kedua


M. Beni Nugraha

Jakarta, 2 Juli 2018
Pihak Pertama


Ajat Sudrajat